

Siaran Pers SPKS untuk Segera disiarkan :

SPKS MEMINTA PEMBELI SAWIT/BAYERS UNTUK MEMPERHATIKAN PETANI SAWIT DI INDONESIA



Ketua SPKS ketika menjadi pembicara dihadapan peserta rapat forum amsterdam deklarasi pada tanggal 14 juni 2019 di ultrac belanda

Belanda, 14 Juni 2019 – ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) **Mansuetus Darto** menjadi pembicara pada rapat rutin yang diadakan oleh forum **Amsterdam Deklarasi**¹ pada tanggal 14 juni 2019 di ultract belanda waktu setempat. Kehadiran ketua SPKS pada rapat amsterdam deklarasi tahun 2019 diundang langsung anggota **Amsterdam Deklarasi** dan diminta untuk memaparkan kondisi riil petani sawit indonesia dan ajakan agar pembeli sawit/negara-negara pembeli sawit di eropa bisa berperan secara nyata dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani sawit di indonesia.

Dalam paparannya mansuetus darto, mejelaskan jika petani sawit indonesia kebanyakan memilki luasan antara 1-4 ha, Tinggal di pedesaan atau sekitar kebun, Tergantung pada hasil

¹ The Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020 : <https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>

kebun sawit dan pekerjaan pokoknya adalah Bertani, Dikerjakan sendiri oleh petani/ keluarga, Mayoritas petani Tidak memiliki lahan pangan dan tidak memiliki legalitas lahan seperti sertifikat dan hanya sebagian kecil dalam kawasan hutan dan gambut, petani sawit saat ini penjualan TBSnya banyak lewat tengkulak dengan harga murah meskipun itu pabrik dekat dengan kebun petani.

Hadir dalam rapat ini adalah perwakilan dari negara-negara unieropa, pembeli sawit di unieropa, pemerintah belanda, perwakilan NGOS internasional dan indonesia, pemerintah indonesia.



Melalui forum ini Ketua SPKS meminta dan merekomendasikan kepada pembeli sawit :

1. Banyak inisiatif yang selama ini melibatkan **pembeli sawit/bayers** masih bekerja pada level traceability bukan pada pemberdayaan petani sehingga pembeli sawit wajib untuk mengikuti Road map petani sawit swadaya untuk pemberdayaan petani sawit pada setiap inisiatifnya di indonesia, dimana pemberdayaan petani sawit mestinya harus dimulai dari : 1. Pemetaan petani sawit dibutuhkan karena belum ada data data petani tersedia tersedia ini juga akan membantu pemerintah dalam pembenahan data petani sawit di indonesia, 2. dalam pemberdayaan petani sawit harus ada klasifikasi berdasarkan legalitas lahan maupun penguasaan lahan, 3. Penguatan kapasitas & kemitraan, 4. Pendampingan pada pengutan Kelembagaan petani sawit (kelompok tani/gapoktan/koperasi), 5. Jualan TBS langsung kepada pabrik sekitar petani (Market akses & farmers welfare).

2. Karena Platform **pembeli sawit/buyers** yang selama ini untuk komitmen sustainability belum dirasakan petani kecil yang legal di Indonesia dan belum menyentuh ke perbaikan harga, sehingga pembeli sawit Buyers harus meminta secara terbuka kepada perusahaan yang suplainya dari petani kecil untuk membeli langsung TBS sawit petani dengan harga yang sesuai prinsip market dan pemerintah.
3. **pembeli sawit/buyers** harus tahu bahwa dengan penjualan TBS langsung ke pabrik akan mampu meningkatkan pendapatan petani mencapai 20-30% dari harga TBS saat ini. Dengan peningkatan pendapatan petani akan memudahkan petani membeli pupuk dan meningkatkan produktivitas serta kehidupan keluarga petani. **Tresability** harus dimulai dari kebun petani karena tidak semua kebun petani ada dalam kawasan hutan dan gambut bukan mill ke plantation.
4. **Pembeli sawit/buyers** memastikan petani yang melindungi hutan HCS adalah equal seperti petani yang peroleh sertifikat RSPO. Karena pada kondisi lapangan justru petani yang melindungi hutan HCS yang real sustain, petani seperti ini belum memperoleh sertifikasi karena mempertimbangkan cost yang mahal. Sehingga Perlu ada model dan pendekatan lain yang equal dengan prinsip prinsip sawit berkelanjutan.
5. **Pembeli sawit/Buyers** harus meminta secara terbuka kepada perusahaan sawit di Indonesia akan kebutuhannya dari petani kecil dan harga yang sesuai menjadi bagian Dalam prinsip market aksesnya. Solusinya **Tresability** Penjualan langsung ke pabrik angkat mampu meningkatkan pendapatan petani mencapai 20-30% dari harga TBS saat ini. Karena harga TBS petani swadaya ditentukan oleh tengkulak. Karena itu, dengan peningkatan pendapatan petani akan memudahkan petani membeli pupuk dan meningkatkan produktivitas serta kehidupan keluarga petani. **Tresability** harus dimulai dari kebun petani karena tidak semua kebun petani ada dalam kawasan hutan dan gambut bukan mill ke plantation.

Tentang SPKS

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani.

SPKS didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

Saat ini, SPKS sudah berada di lima Provinsi dan delapan Kabupaten. Delapan kabupaten tersebut di antaranya Labuhan Batu Utara (Sumut), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Rokan Hulu (Riau), Kuantan Singingi (Riau), Sanggau (Kalbar) Sekadau (Kalbar), Sintang (Kalbar) dan Paser (Kaltim). Anggota SPKS sebanyak 48 ribu petani kecil dengan skala lahan kurang dari 25 hektar dan bekerja langsung di kebun.

Selain di lima provinsi dan delapan kabupaten, SPKS juga melakukan berbagai program kerja, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi untuk menunjang kemampuan dan

kapasitas petani sawit swadaya maupun plasma di beberapa wilayah Kabupaten lainnya seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra selatan yang belum memiliki basis SPKS daerah.

Kontak Media Manager Keanggotan dan Organisasi SPKS :
Sabarudin

085398995217